

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN (LKPj) GUBERNUR BANTEN PERIODE 2012-2017 (Suatu Tinjauan)

Toni Anwar Mahmud¹

Universitas Banten Jaya
Serang, Indonesia

toniam@unbaja.ac.id¹

ABSTRACT

As per the laws and regulations the regional government is obliged to submit a statement of accountability at the end of the term of office. The report contains information on the implementation of Decentralization, Co-Administration and Public Administration. The methodology in this research was carried out by the method of library study (documentary study) to collect data and information. The documentation study was carried out by conducting a comparative study of policy documents that became legal references, including: (1) Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) 2012-2017, (2) Banten Provincial Regulation Number 3 of 2015 Concerning Changes Banten Province Regional Revenue and Expenditure Budget 2015 and (3) Official BPS News. The results of the study found that the information conveyed in the report did not adjust to the indicators, benchmarks and achievements as stated in the 2015 RKPD. There was no visible relationship between vision, mission, goals and performance achievements in 2015. The performance of the Banten provincial government in general, have not yet achieved the vision and mission stated in the 2012-2017 RPJMD document.

Keywords: Accountability Statement Report, LKPj

PENDAHULUAN

Periode pemerintahan gubernur periode 2012-2017 yang berakhir pada 11 Januari 2017 dimana Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/P-Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, ditetapkan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE sebagai Gubernur dan H. Rano Karno sebagai Wakil Gubernur Banten Periode Tahun 2012-2017 dan telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 11 Januari 2012. Dalam perjalanan kepemimpinan gubernur Banten terjadi proses yang kurang ideal dimana pada tahun 2014, H. Rano Karno S.IP ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt)

Gubernur Banten berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P tahun 2014 tanggal 8 Mei 2014. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P tahun 2015, tanggal 11 Agustus tahun 2015, H. Rano Karno ditetapkan sebagai Gubernur Banten sisa masa jabatan tahun 2015-2017. Sesuai dengan amanat pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana disebut di atas, maka dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Periode Tahun 2012-2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, hal ini dikarenakan belum ada Peraturan Pemerintah Tentang Penjabaran UU Nomor 23 Tahun 2014. Laporan keterangan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan merupakan laporan yang berisi informasi penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Pemerintahan Umum selama periode tahun 2012-2017 yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD. Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2016 telah memasuki akhir periode jabatan dan akhir dari pelaksanaan RPJMD tahun 2012-2017 dimana perencanaan tersebut telah dituangkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahunan. Sebagaimana amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi aktual, dan permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah: **“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa”** Dalam mewujudkan visi tersebut, provinsi Banten menetapkan misi pembangunan yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai hingga tahun 2017. RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025,

berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Banten dalam segala bidang, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Banten. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan suprastruktur dan infrastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, revitalisasi infrastruktur yang telah ada, meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas. Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (*core business*) berdasarkan potensi unggulan untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan

kemampuan keuangan daerah. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur bagi penyediaan energi termasuk listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui peningkatan keberpihakan dalam penganggaran pada bidang pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, serta infrastruktur wilayah dan kawasan. Dalam upaya melaksanakan keseluruhan visi, misi dan tujuan pembangunan yang ada, maka dibutuhkan strategi dan arah kebijakan daerah sebagai implemetasi pelaksanaannya. Adapun strategi dan arah kebijakan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Povinsi Banten tahun 2012-2017. Terdapat 149 Strategi untuk mencapai

tujuan dan sasaran dari setiap misi, dirumuskan melalui, Misi ke-1 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan. Misi pertama ditempuh melalui 30 Strategi. Misi ke-2 Pemantapan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi kedua ditempuh melalui 21 Strategi. Misi ke-3 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang religius, cerdas dan berdaya saing dalam kerangka penguatan NKRI. Misi ketiga ditempuh melalui 54 Strategi. Misi ke-4 Penguatan semangat kebersamaan antar-pelaku pembangunan dan sinergitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang selaras, serasi dan seimbang. Misi keempat ditempuh melalui 15 Strategi. Misi ke-5 Peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien. Misi kelima ditempuh melalui 29 Strategi.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Dana Perimbangan
Tahun 2012-2016

DANA PERIMBANGAN		2012	2013	2014	2015	2016*)
Bagi	Target	457.361.000.000	603.763.881.000	422.536.970.000	520.201.605.000	526.279.279.000
Hasil Pajak/Bagi	Realisasi	454.584.589.897	498.321.857.838	418.844.143.122	319.017.534.900	261.484.769.877
Hasil	(%)	99,39	82,54	99,13	61,33	49,69
Bukan Pajak	Target	530.833.000.000	617.081.101.000	728.490.012.000	640.981.003.000	693.446.854.000
Dana Alokasi Umum	Realisasi	530.833.378.000	617.081.101.000	728.490.012.000	640.981.003.000	288.936.180.000
Dana	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	41,67
Dana	Target	29.687.000.000	14.134.950.000	16.717.970.000	20.986.310.000	1.537.831.790.00

DANA PERIMBANGAN		2012	2013	2014	2015	2016*)
Alokasi						0
Khusus	Realisasi	29.687.000.000	10.601.213.000	12.538.478.000	16.789.048.000	514.563.024.000
	(%)	100,00	75,00	75,00	80,00	33,46
	Target	1.017.881.000.000	1.234.979.932.000	1.167.744.952.000	1.182.168.918.000	2.757.557.923.000
JM	Realisasi	1.015.105.167.897	1.126.004.171.838	1.159.872.633.122	976.787.585.900	1.064.983.973.877
	(%)	99,73	91,18	99,33	82,63	38,62

Sumber : Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012-2015, Audited

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dari tahun 2012-2016 dalah sebagai berikut: tahun 2012 realisasi sebesar 99,73%, tahun 2013 realisasi sebesar 91,18%, tahun 2014 realisasi sebesar 99,33%, dan tahun 2015 realisasi sebesar 82,63%, sedangkan tahun 2016 terealisasi sampai dengan semester I sebesar 38,62%. Sehingga selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 semester I terealisasi sebesar 72,59% atau sebesar Rp5.342.753.532.634,- (*Lima Trilyun Tiga Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus*

Tiga Puluh Empat Rupiah) dari Total anggaran sebesar Rp7.360.332.725.000,- (*Tujuh Trilyun Tiga Ratus Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Pendapatan Lainnya. Berikut rincian target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 semester I untuk masing-masing bagian, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2012-2016

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		2012	2013	2014	2015	2016*)
Pendapatan Hibah	Target	5.050.000.000	5.400.000.000	421.758.000	5.150.000.000	5.400.000.000
	Realisasi (%)	4.256.098.000 84,28	4.670.632.000 86,49	5.441.490.000 1.290,19	5.245.680.000 101,86	913.200.000 16,91
Dana Penyesuaian	Target	1.047.068.690.000	1.050.445.240.000	1.009.433.920.000	1.382.691.600.000	-
	Realisasi (%)	998.428.325.000 95,35	979.144.586.000 93,21	1.001.583.024.000 99,22	1.372.280.428.500 99,25	475.316.700.000 -
Pendapatan	Target	-	-	970.884.054	2.277.296.820	-

Lainnya	Realisasi (%)	32.548.810	1.858.707.502	2.410.023.776	1.169.455.746	527.538.993
	Target	1.052.118.690.000	1.055.845.240.000	1.010.826.562.054	1.390.118.896.820	5.400.000.000
JUMLAH	Realisasi (%)	1.002.716.971.810	985.673.925.502	1.009.434.537.776	1.378.817.456.419	476.757.438.993
		95,30	93,35	99,86	99,19	8.828,84

Sumber : Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012-2015, Audited

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut: tahun 2012 realisasi sebesar 95,30%, tahun 2013 realisasi sebesar 93,35%, tahun 2014 realisasi sebesar 99,86%, dan tahun 2015 realisasi sebesar 99,19%, sedangkan tahun 2016 terealisasi sampai dengan semester I sebesar 8.828,84%. Sehingga selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 semester I terealisasi sebesar 107,51% atau sebesar Rp4.853.400.330.500,- (*Empat Trilyun Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*) dari Total anggaran sebesar Rp4.514.309.388.874,- (*Empat Trilyun Lima Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) Pengelolaan Belanja Daerah. Selama tahun 2012-2016, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja daerah. Upaya tersebut melalui:

1. Peningkatan sistem penganggaran daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPADA),

2. Peningkatan sistem pengelolaan perbendaharaan daerah melalui Sistem Perbendaharaan Daerah (SIMPEDA),
3. Peningkatan sistem pelaporan keuangan daerah melalui Sistem Akuntansi Keuangan (SIAKU),
4. Peningkatan sistem manajemen barang daerah (SIMDA),
5. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan,
6. Peningkatan sarana dan prasarana administrasi pengelolaan keuangan,
7. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan,
8. Monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Berikut ini rekapitulasi pengelolaan belanja daerah Provinsi Banten tahun 2012 sampai dengan 2016 Berdasarkan Jenis Belanja, yang bersumber dari Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012-2015 dan Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Semester I tahun 2016:

Tabel 1.4-a
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2012-2016
(Tabel ini dibagi menjadi 3 bagian)

URAIAN	2012			2013			2014		
	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	SELISIH (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	SELISIH (Rp.)	
BELANJA DAERAH									
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.480.205.368.686,00	3.300.647.526.762,00	94,84	179.557.841.924,00	3.567.220.403.639,00	3.316.069.656.604,00	92,96	251.150.747.035,00	
Belanja Pegawai	402.986.912.939,00	384.981.221.088,00	95,53	18.005.691.851,00	473.245.389.000,00	423.141.043.569,00	89,41	50.104.345.431,00	
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	
Belanja Hibah	1.364.645.690.000,00	1.288.347.988.660,00	94,41	76.297.701.340,00	1.465.014.765.000,00	1.331.719.638.201,00	90,90	133.295.126.799,00	
Belanja Bantuan Sosial	39.540.000.000,00	38.852.100.000,00	98,26	687.900.000,00	86.940.000.000,00	36.185.650.000,00	41,62	50.754.350.000,00	
Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	1.202.911.765.747,00	1.177.659.225.703,00	97,90	25.252.540.044,00	1.343.270.249.639,00	1.334.273.509.903,00	99,33	8.996.739.736,00	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	464.121.000.000,00	410.060.814.931,00	88,35	54.060.185.069,00	193.750.000.000,00	190.749.814.931,00	98,45	3.000.185.069,00	
Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	746.176.380,00	12,44	5.253.823.620,00	5.000.000.000,00	-	0,00	5.000.000.000,00	
Belanja Bantuan PILKADA	-	-	-	-	-	-	-	-	
BELANJA LANGSUNG	2.182.509.170.000,00	2.017.087.961.855,00	92,42	165.421.208.145,00	2.839.667.825.000,00	1.979.069.495.393,00	69,69	860.598.329.607,00	
Belanja Pegawai	154.397.970.200,00	148.070.030.980,00	95,90	6.327.939.220,00	203.086.202.000,00	181.862.098.337,00	89,55	21.224.103.663,00	
Belanja Barang dan Jasa	995.008.582.352,99	951.318.822.889,00	95,61	43.689.759.463,99	1.116.203.639.924,00	983.932.219.941,00	88,15	132.271.419.983,00	
Belanja Modal	1.033.102.617.447,01	917.699.107.986,00	88,83	115.403.509.461,01	1.520.377.983.076,00	813.275.177.115,00	53,49	707.102.805.961,00	
JUMLAH BELANJA DAERAH	5.662.714.538.686,00	5.317.735.488.617,00	93,91	344.979.050.069,00	6.406.888.228.639,00	5.295.139.151.997,00	82,65	1.111.749.076.642,00	

Sumber : Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012-2015, Audited

Tabel 1.4. -b
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2012-2016
(Tabel Lanjutan)

URAIAN	2014				2015			
	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	SELISIH (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	SELISIH (Rp.)
BELANJA DAERAH								
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.351.471.859.360,00	4.013.607.703.615,00	92,24	337.864.155.745,00	4.980.852.559.137,00	4.758.963.213.403,00	95,55	221.889.345.734,00
Belanja Pegawai	568.367.964.269,00	481.328.441.248,00	84,69	87.039.523.021,00	567.567.301.632,00	544.637.409.065,00	95,96	22.929.892.567,00
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	1.376.459.645.000,00	1.244.666.640.856,00	90,43	131.793.004.144,00	1.544.469.805.000,00	1.500.205.771.116,00	97,13	44.264.033.884,00
Belanja Bantuan Sosial	91.000.000.000,00	86.602.000.000,00	95,17	4.398.000.000,00	136.250.000.000,00	131.217.500.000,00	96,31	5.032.500.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	1.870.732.614.091,00	1.764.024.522.670,00	94,30	106.708.091.421,00	2.041.146.741.000,00	1.920.559.281.430,00	94,09	120.587.459.570,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	439.911.636.000,00	436.986.098.841,00	99,33	2.925.537.159,00	659.209.919.468,00	657.845.799.066,00	99,79	1.364.120.402,00
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	-	0,00	5.000.000.000,00	32.208.792.037,00	4.497.452.726,00	13,96	27.711.339.311,00
Belanja Bantuan PILKADA	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA LANGSUNG	3.521.231.906.081,00	2.178.547.864.325,00	61,87	1.342.684.041.756,00	4.297.214.933.055,00	3.325.176.945.591,00	77,38	972.037.987.464,00
Belanja Pegawai	169.652.138.550,00	144.776.980.151,00	85,34	24.875.158.399,00	179.012.016.788,00	156.935.312.600,00	87,67	22.076.704.188,00
Belanja Barang dan Jasa	1.611.952.687.442,90	1.342.462.761.217,00	83,28	269.489.926.225,90	2.180.750.173.451,00	1.732.271.926.147,00	79,43	448.478.247.304,00
Belanja Modal	1.739.627.080.088,10	691.308.122.957,00	39,74	1.048.318.957.131,10	1.937.452.742.816,00	1.435.969.706.844,00	74,12	501.483.035.972,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	7.872.703.765.441,00	6.192.155.567.940,00	78,65	1.680.548.197.501,00	9.278.067.492.192,00	8.084.140.158.994,00	87,13	1.193.927.333.198,00

Sumber : Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012-2015, Audited

Tabel 1.4-c
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2012-2016

(Tabel Lanjutan)

URAIAN	2016*)		%	SELISIH (Rp.)
	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
BELANJA DAERAH				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.201.735.268.500,00	2.357.398.568.148,00	45,32	2.844.336.700.352,00
Belanja Pegawai	651.528.843.582,00	249.264.874.156,00	38,26	402.263.969.426,00
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	1.847.838.600.000,00	1.229.268.980.000,00	66,52	618.569.620.000,00
Belanja Bantuan Sosial	152.040.000.000,00	33.521.250.000,00	22,05	118.518.750.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	1.978.572.522.200,00	711.372.181.997,00	35,95	1.267.200.340.203,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	536.755.302.718,00	133.872.522.395,00	24,94	402.882.780.323,00
Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000,00	98.759.600,00	0,28	34.901.240.400,00
Belanja Bantuan PILKADA	-	-	-	-
BELANJA LANGSUNG	3.609.341.540.600,00	527.825.314.995,00	14,62	3.081.516.225.605,00
Belanja Pegawai	159.567.244.150,00	34.842.644.000,00	21,84	124.724.600.150,00
Belanja Barang dan Jasa	1.719.249.706.940,00	341.490.167.120,00	19,86	1.377.759.539.820,00
Belanja Modal	1.730.524.589.510,00	151.492.503.875,00	8,75	1.579.032.085.635,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	8.811.076.809.100,00	2.885.223.883.143,00	32,75	5.925.852.925.957,00

*Keterangan : *) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016, Semester I*

Makro Ekonomi

Capai makro ekonomi yang dicapai pemerintah provinsi Banten dapat dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 1.5. Target dan Capai Makro Ekonomi
Tahun 2012-2016

TAHUN	I P M		LPE		Persentase Penduduk Miskin		Persentase Pengangguran Terbuka	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
2012	72,92	68,92	6,0-6,45	6,83%	5,79-5,34	5,71%	10,74	9,83%

2013	73,47	69,47	6,5-6,7	6,67%	5,5-5,2	5,89%	10,24	9,54%
2014	74,02	69,89	6,6-6,8	5,47%	5,3-5,0	5,51%	9,74	9,07%
2015	74,57	70,27	6,7-6,8	5,37%	5,1-4,8	5,75%	9,24	9,55%
2016	75,13	70,35	6,8-6,9	5,13%	4,9-4,7	5,42%	8,74	7,95%
Rata-Rata	69.78		5.89%		5.66%		9.19%	

- a. **Capaian IPM** dari 2012 sampai dengan 2016 terjadi progrss peningkatan, namun secara pencapaian target setiap tahun tidak tercapai, sehingga Pemerintah Provinsi Banten harus melakukan review terhadap program/kegiatan, penganggaran dan aparatur yang menangani urusan pemerintahan tersebut; Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renja SKPD pemetaan target capaian indikator tidak dapat disamaratakan harus disesuaikan dengan urusan pemerintahan masing-masing perangkat daerah.
- b. Tahun 2012 target **LPE** melebihi target, hal tersebut merupakan prestasi pemerintah daerah, namun sepanjang tahun 2014 hingga 2016 selain terjadi penurunan LPE juga tidak tercapainya target LPE provinsi Banten. DPRD provinsi Banten menyarankan Perangkat Daerah terkait bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus lebih peka terhadap tingkat inflasi dan daya beli masyarakat sehingga perlu adanya program/kegiatan yang terintegrasi dari perangkat daerah terkait, untuk dapat menumbuhkembangkan dan terus meningkatkan LPE provinsi Banten.
- c. Terkait **Penduduk Miskin**, Pemerintah provinsi Banten belum dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Dimana jumlah penduduk miskin masih fluktuatif dan jumlahnya masih signifikan, tahun 2012 sebesar 642,88 ribu jiwa, 2013 sebanyak 677,51 ribu jiwa, 2014 sebanyak 649,19 ribu jiwa, dan 2015 sebesar 690,67 ribu jiwa penduduk, untuk itu Pemerintah provinsi Banten harus melakukan review atas program/kegiatan, anggaran dan SDM yang menangani penurunan jumlah penduduk miskin; Melakukan penguatan program jaminan kesejahteraan sosial antara lain: jamsosratu, Program Keluarga Harapan (PKH) dan penanganan berkelanjutan terhadap penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) di Provinsi Banten.

- d. Sepanjang 2012-2014 pemerintah provinsi Banten dapat menurunkan **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** namun untuk tahun 2015-2016 selain semakin naiknya angka TPT juga pemerintah provinsi Banten tidak dapat mencapai target angka TPT. Rata-rata pengangguran terbuka setiap tahun sebanyak 490,161 ribu orang, sehingga kedepannya, Pemerintah provinsi Banten perlu membuat MoU dengan pihak investor yang memprioritaskan penduduk Banten yang memenuhi kualifikasi dalam pengisian lapangan pekerjaan; Pemerintah Provinsi Banten memperbanyak program/kegiatan yang berkelanjutan untuk peningkatan daya saing masyarakat Banten baik *hard skill* maupun *soft skill*.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaannya pembangunan pemerintah provinsi Banten masih perlu mendapat penyempurnaan dari berbagai aspek. Jumlah serapan anggaran belanja sebesar **Rp. 29.220.374.024.958,- (Dua Puluh Sembilan Trilyun Dua Ratus Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan**

Rupiah) dan direalisasikan sebesar **Rp. 24.889.170.367.548,- (Dua Puluh Empat Trilyun Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)** sehingga terdapat selisih atau jumlah yang tidak terserap sepanjang tahun 2012-2015 adalah sebesar **Rp. 4.331.203.657.410,- (Empat Trilyun Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah)** atau sebesar **14, 82%**. Secara umum LKPj Akhir Masa Jabatan Gubernur Banten Periode 2012-2017 telah memberikan informasi, namun belum menyesuaikan kepada indikator, tolok ukur dan capaian-capaian sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2015. Belum terlihat hubungan antara visi, misi, tujuan dan capaian kinerja di tahun 2015. Kinerja pemerintah daerah provinsi Banten secara umum belum mencapai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2012-2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj)

Gubernur Banten Periode 2012-2017	Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemreintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten
Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara	

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1
Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Banten Tahun
2005-2025

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4
tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi
Banten Tahun 2012-2017

Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 73/P-Tahun 2011
tanggal 15 Desember 2011
tentang Pengangkatan Gubernur
dan Wakil Gubernur Banten,
ditetapkan Hj. Ratu Atut
Chosiyah, SE sebagai
Gubernur dan H. Rano Karno
sebagai Wakil Gubernur Banten
Periode Tahun 2012 - 2017

Keputusan Presiden Nomor 78/P tahun
2015 tentang Pengesahan
Pengangkatan Gubernur Banten
sisa masa jabatan tahun 2012-
2017